



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI (DPMD/N)
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat 30, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh tahapan ini dimulai pada bulan Desember 2024, dan akan selesai pada bulan Juli 2025.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2024.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan pasal 126, rancangan awal ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 ini juga

penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat februari 2024. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPMD/N Tahun 2026, direncanakan selesai bulan Februari 2025. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalisasi pencapaian sasaran Rentra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2026 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbangda untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbangda paling lambat minggu keempat bulan Februari 2025.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbangda. Namun berdasarkan kesepakatan Bapelitbangda dengan OPD untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbangda. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja DPMD/N Tahun 2026 disampaikan ke Bapelitbangda untuk diverifikasi oleh tim paling lambat April 2025. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh DPMD/N, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbangda untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkada tentang RKPD oleh Bapelitbangda, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Selengkapny tabel jadwal penyusunan Renja Perangkat Daerah disajikan pada tabel 1.1

RKPD Tahun 2026 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Seperti halnya RKPD 2026, maka Renja DPMD/N Tahun 2026 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-1 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari periode tahun 2025-2029. Renja DPMD/N ini selanjutnya juga akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481).
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029.

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026 ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab DPMD/N secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan DPMD/N.
3. Menyediakan dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPMD/N untuk Tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026 ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf DPMD/N dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPMD/N.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMD/N pada Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 mengacu pada Pasal 129 Permendagri 86 Tahun 2017, yang terdiri dari lima Bab dengan uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2026, landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun Lalu.

Bab dua ini memberikan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024-2025 dan capaian terhadap target Renstra DPMD/N hingga Tahun 2025, analisis kinerja pelayanan DPMD/N, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran DPMD/N.

Bab tiga memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.

Bab ini menguraikan Rencana Kerja, Target dan Indikator Kinerja serta Pendanaan yang dibutuhkan.

V. Penutup.

Bab kelima merupakan ketentuan penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMD/N berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMD/N tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2024 dan realisasi Renstra DPMD/N mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPMD/N dan/atau realisasi APBD untuk DPMD/N. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMD/N.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan.

Kondisi anggaran DPMD/N tahun 2024 diawal tahun anggaran adalah Rp. 5.034.142.620,-. Kemudian pada perubahan anggaran meningkat menjadi Rp. 5.583.033.385,-. Terdapat penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan. Pada anggaran 2024 tidak ada Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan. Semua Program/Kegiatan berjalan sesuai Target yang telah ditetapkan. Penambahan anggaran pada subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2024, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.330.609.005,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.292.932.823,- (98,87%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan Capai Kinerja Terlaksananya Administrasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.826.580,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.826.500,- (99,90%) serta realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan perlengkapan alat-alat listrik kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.845.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.804.100,- (99,67%) serta realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa penerangan dan sumber daya air yaitu listrik 12 bulan dan air 12 bulan, dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.393.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 129.392.807 (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jasa Service ,Penggantian Suku Cadang,BBM, Pembayaran STNK Kedaraan dinas serta Pelumas Kendaraan Dinas Roda Empat sebanyak 4 unit dan roda dua sebanyak 10 unit. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Pemeliharaan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.336.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 63.260.000 (99,88%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini

adalah pemeliharaan Teras Kantor, Loteng Ruang Kepala Dinas dan Partisi Ruang aula Kantor. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.584.300,- dan realisasi Rp. 74.878.800,- (96,51%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Sosialisasi Kegiatan Posyandu.
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.965.438.750.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.952.940.324.- (99,36%), serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah, Bimtek KP-SPAM, Bimtek KAN, Bimtek Dasawisma, Bimtek PKK, Coaching Klinik, Bimtek KPM, Bimtek Bumnag, Bimtek Bamus, Bimtek Prodeskel, Bimtek Pengelolaan Keuangan, Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN, Jambore PKK dan Gathering PKK.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Pada Tahun 2024 tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD/N terlaksana dengan baik. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan sampai dengan **Desember 2024** dapat dicapai **99,05%**, dan realisasi fisik sampai dengan Desember 2024 dapat dicapai **100%**.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2024-2025 dan pencapaian kinerja Renstra DPMD/N, dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan terhadap target Renstra tinggi. Rekapitulasi Evaluasi

Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sampai dengan Tahun 2024 dan prakiraan realisasi tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan
Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tw.II Tahun 2025
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%	100%	78.84	100%		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%		80%	80%	100	85%		
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	9 Dokumen	4 dok	-	-	-	-	8 dok	88%
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6 Dokumen	4 dok	-	-	-	-	4 dok	66%
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	6 Dokumen	3 dok	-	-	-	-	3 dok	50%
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	6 Dokumen	4	-	-	-	-	6 dok	100%
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	6 Dokumen	3	-	-	-	-	3 dok	50%
2.13.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKjIP, SPIP, LKPJ, SPBE, dan PK)	29 Dokumen	16 dok	-	-	-	-	25 dok	86%
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	24 Laporan	12 lap	-	-	-	-	16 Lap	66%
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%		100%	100%	81.09	100%		
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	143 ASN	139 ASN	31 ASN	31 ASN	100	31 ASN	170 ASN	97
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	60 Bulan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	15000 Dokumen	-	-	-	-	-	11450 dok	76%
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	60 Bulan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	6 Dokumen	-	-	-	-	-	5 dok	83%
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen LHP yang ditindak lanjuti	26 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	60 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%		100%	100%	12.30	100%		
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen	-	-	-	-	-	4 dok	44%
2.13.01.2.03.01	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	13 Laporan	4 Lap	3 Laporan	3 Laporan	100	2 Laporan	9 Lap	69 Lap
2.13.01.2.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan BMD SKPD	60 Bulan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		0%	0%	0.00	100%		
2.13.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	5 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	373 Stel	-	-	-	-	-	48 Stel	
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	245 Dokumen	-	-	-	-	-	47 Dokumen	
2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi sistem informasi kepegawaian	60 Bulan	-	-	-	-	-	12 Bulan	
2.13.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP ASN	144 Dokumen	-	-	-	-	-	90 dok	62%
2.13.01.2.05.06	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Pindah Tugas	10 ASN	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 ASN	-	-	-	-	-	5 ASN	-
2.13.01.2.05.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 ASN	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 ASN	-	-	-	-	-	40	160%
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	100%	52.27	100%		
2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	36 Jenis	30 jenis	9 jenis	9 jenis	100	6 Jenis	45 jenis	125%
2.13.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	26 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis	38 jenis	126%
2.13.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	18 Paket	18 paket	-	-	-	-	18 paket	100%
2.13.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah ATK dan Alat Kebersihan kantor yang disediakan	36 Paket	30 paket	6 paket	6 paket	100	6 Paket	42 paket	116%
2.13.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	48 Jenis	48 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	52 jenis	108%
		Jumlah penggandaan yang disediakan	17990 Lembar	12300 lembar	1100 lembar	1100 lembar	100	1250	14650 lembar	81%
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1080 Eksemplar	300 eks	300 eks	300 eks	100	300 Eks	900 Eks	83%
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan	72 Bulan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	5650 Orang	3970 orang	420 orang	510 orang	121 %	300 orang	4780 orang	84%
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang disusun	900 Laporan	900 lap	230 lap	210 lap	91%	200 lap	1310 lap	145%
		Jumlah makan minum rapat yang disediakan	1800 Porsi	800 porsi	270 porsi	210 porsi	77%	600 porsi	1610 porsi	89%
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan retensi arsip substantif/ arsip dinamis yang disusun	6 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi SPBE	48 Bulan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan	14 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah filling kabinet yang diadakan	93 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kursi tamu/sofa yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah lemari arsip yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah meja 1/2 biro yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer yang diadakan	57 Unit	4 unit	13 unit	13 unit	100	4 unit	21 unit	36%
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana/prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (gudang,dll) yang diadakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (tempat parkir, dll) yang diadakan	5 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	100%	80.70	100%	-	-
2.13.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	24 jenis	25 jenis	-	-	-	-	25 jenis	104%
2.13.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon /fax yang dibayarkan	72 Rekening	48 Rekening	12 rekening	12 rekening	100%	12 rekening	60 rek	83%
		Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	72 Rekening	36 Rekening	12 rekening	12 rekening	100%	2 rekening	60 rek	83%
		Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	72 Rekening	36 Rekening	12 rekening	12 rekening	100%	2 rekening	60 rek	83%
2.13.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	155 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	105 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	100%	-	100%	100%	66.94	100%	-	-
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	114 Unit	57 unit	19 unit	19 unit	100	19 Unit	95 unit	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.09.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5 Unit	5 unit	-	-	-	-	5 unit	100%
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	625 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/kantor lainnya	30 Paket	10 paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	30 paket	100%
		Jumlah pemeliharaan komputer/laptop/ printer	115 Unit	23 unit	5 unit	7 unit	140	3 Unit	33 unit	28%
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 Unit	1 unit	--	-	-	1 Unit	2 unit	33%
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	51 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	60 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						56.80			
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	12,5%	-	-	-	-	-	-	-
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	12,5%	-	-	-	-	-	-	-
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase nagari yang ifasilitasi dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	12,5%	-	-	-	-	-	-	-
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa	100%		0,2%	0,2%	49.77	54,43%		
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	158 Nagari	0 Kawasan					kawasan	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dalam Kabupaten	79 Nagari							
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga	79 Nagari							
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	1 Kawasan Perdesaan	Kawasan					kawasan	100%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan			100%	100%	51.85	100%		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	68%		56%	56%	51.85	58%		
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	79 Wali Nagari	79 WN	0	0	0.00	100%	79 WN	100%
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti pelatihan bimtek penyusunan produk hukum desa / nagari	796 Aparatur	158 aparatur	79 aparatur	79 aparatur	100	79 aparatur	316 aparatur	39%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	95%		-	-	-	-	-	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Nagari Dengan Penyelesaian RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat waktu	100%	100%	-	-	-	-		100%
		Persentase evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	100%	100%	-	-	-	-		100%
		Persentase pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disusun	100%	100%	-	-	-	-		100%
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	persentase aparaturn pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari berbasis aplikasi SISKEUDES	100%	100%	-	-	-	-		100%
		Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa yang terlaksana	100%	100%	-	-	-	-		100%
		Persentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan nagari yang terlaksana	100%	100%	-	-	-	-		100%
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	79 nagari		79 Nagari	79 Nagari	36.96	79 Nagari		100%
		Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam penataan administrasi pemerintahan nagari	13 Nagari		13 Nagari	13 Nagari		13 Nagari		100%
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Nagari dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Musyawarah (Musrenbang) Desa/Nagari dan Kecamatan	79 Nagari dan 13 Kec		79 Nagari dan 13 Kec	79 Nagari dan 13 Kec	62.17	79 Nagari dan 13 Kec		100%
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah rancangan/ dokumen Pernag yang dievaluasi pada tahun berjalan	1422 Dokumen		237 rancangan/ dokumen	237 rancangan/ dokumen	94.66	237 rancangan/ dokumen		
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	95%		80%	80%	53.68	82%		
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	12 BumDesa		0	0		4 BumDesa		
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak	79 Nagari		18 Nagari	18 Nagari	0.00	52 Nagari		
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	79 Nagari		-	-	0.00	79 Nagari		100%
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/ monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	79 Nagari		26 Nagari	26 Nagari	100.00	39 Nagari		
		Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	79 Nagari		40 Nagari	40 Nagari		45 Nagari		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah nagari dengan status swadaya	0		3 Nagari	3 Nagari		2 Nagari		
		Jumlah nagari dengan status swasembada	31 Nagari		27 Nagari	27 Nagari		28 Nagari		
		Persentase nagari dengan status mandiri	14%		5%	5%		5%		
		Persentase nagari dengan status tertinggal	0%		2.5%	2.5%		2.5%		
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa	1250 orang		0	0	0.00	250 orang		
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	10000%		85%	85%	89.28	85%		
2.13.04.2.01.14	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	719 orang		0	0	0.00	79 orang		
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa	79 nagari		2 nagari	2 nagari	28.94	2 nagari		
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Pemusyawaratan Desa/Nagari (Bamus Nagari)	100%		25%	25%	79.90	50%		
		Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja Bamus Nagari Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku	100%		60%	60%	0.00	70%		
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	54		44	44	57.90	46		
		Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan	33		35	35		34		
		Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten	3		3	3		3		
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional.	48 Kegiatan		5	5		7 Kegiatan		
		Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional	18 Inovasi		3 Inovasi	3 Inovasi		3 Inovasi		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	75%		50%	50%	59.94	55%		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	75%		50%	50%	59.94	55%		
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat, lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	6 Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	40.21	1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat		100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	711 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)		79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	89.47	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)		100%
		Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		100%
		Jumlah KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan	95 RDS/KPM (100%)		95 RDS/KPM (100%)	95 RDS/KPM (100%)		95 RDS/KPM (100%)		100%
		Jumlah Rakor Pokjantal Posyandu Tk Kabupaten	11 X Rakor Pokjantal Posyandu Tk Kab dalam 6 tahun		1 X Rakor Pokjantal Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun	1 X Rakor Pokjantal Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun		2 X Rakor Pokjantal Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun		100%
		Persentase Posyandu Aktif Mandiri	20 % Posyandu aktif mandiri		12 % Posyandu aktif mandiri	12 % Posyandu aktif mandiri		13 % Posyandu aktif mandiri		100%
		Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	Fasilitasi KKN 15 Perguruan Tinggi		Fasilitasi KKN 10 Perguruan Tinggi	Fasilitasi KKN 10 Perguruan Tinggi		Fasilitasi KKN 12 Perguruan Tinggi		100%
		Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		20 Lembaga PKK Dinagari (25%)	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		100%
		Jumlah Pokja Posyandu Aktif	5 Pokja Poyandu di Nagari		5 Pokja Poyandu di Nagari	5 Pokja Poyandu di Nagari		5 Pokja Poyandu di Nagari		100%
		Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Pendagunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	1 Regulasi (Perbud)		1 Regulasi (Perbud)	1 Regulasi (Perbud)		1 Regulasi (Perbud)		100%
			Hibah LKAAM (6 Kegiatan)		Hibah LKAAM (1 Kegiatan)	Hibah LKAAM (1 Kegiatan)		Hibah LKAAM (1 Kegiatan)		100%
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	359 KPMD		20 KPMD	20 KPMD	47.95	40 KPMD		100%
		Persentase LPM Aktif	80%		58%	58%		60%		100%
		Jumlah kelompok BP- SPAMS dan KPP-FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan monev	141 KP SPAM		20 KSPAMS	20 KSPAMS		60 KSPAM		100%
		Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	11 Kali Rakor		1 Kali Rakor	1 Kali Rakor		2 Kali Rakor		100%
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	40 Kelompok		0	0	0.00	26 Kelompok		100%
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek Yang Terbentuk	79 Posyantek		2 Posyantek	2 Posyantek	21.60	6 Posyantek		100%
		Jumlah Gelar TTG yang diikuti	18 Gelar TTG		3 Gelar TTG	3 Gelar TTG		3 Gelar TTG		100%
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pelaksanaan dan monitoring kegiatan BBGRM	79 Nagari		79 Nagari	79 Nagari	57.33	79 Nagari		100%
		Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pencanangan BBGRM	6 Nagari		1 Nagari	1 Nagari		1 Nagari		100%
		Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMN	3 Nagari		1 Nagari	1 Nagari		0		
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PPK yang mendapatkan Pembinaan Se kab. Lima Puluh Kota	93 Kelompok		93 Kelompok	93 Kelompok	54.85	93 Kelompok		100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Bila di disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Peraturan Perundang-undangan diatas, maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dengan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kabupaten.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari.
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024-2027

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021-2025		2025-2029		2024	2025	2026	2027	
				2024	2025	2026	2027					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	-	√	84%	85%	-	-	84%	85%	-	-	Tercapai
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	√	1.25%	50%	-	-	1.25%	50%	-	-	Tercapai
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	-	√	10%	54,17%	-	-	55.7%	56,95%	-	-	Tercapai
4	Persentase Desa Mandiri	-	√	-	-	88,61%	91,14%	-	-	88,61%	91,14%	-
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	-	√	-	-	90%	90%	-	-	90%	90%	-
6	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	√	-	-	80%	80%	-	-	80%	80%	-
7	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	-	√	-	-	0%	4%	-	-	0%	4%	-
8	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	-	√	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
9	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	-	√	-	-	90%	90%	-	-	90%	90%	-
10	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	-	√	-	-	0%	100%	-	-	0%	100%	-

Status Nagari/Desa diukur berdasarkan kepada pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun bertujuan:

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa.
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Klasifikasi Desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) adalah:

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa/Nagari. Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan data IDM Tahun 2024-2025 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
STATUS DESA/NAGARI DI KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024 - 2025

No.	Status IDM	Jumlah Nagari	
		2024	2025
1	Mandiri	44 Nagari	0
2	Maju	33 Nagari	0
3	Berkembang	1 Nagari	2
4	Tertinggal	1 Nagari	7
5	Sangat Tertinggal	0 Nagari	70
	Jumlah	79 Nagari	79 Nagari

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DPMD/N

Dengan adanya Program Kegiatan, Subkegiatan yang telah dilaksanakan DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun baik dari kegiatan gotong royong maupun berupa bantuan fisik/ material sehingga swadaya masyarakat lebih baik dan meningkat dari tahun sebelumnya.
2. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan akses sumber daya baik secara fisik maupun non fisik.
3. Meningkatnya sumber daya pemangku adat di nagari dan pengetahuan kader terhadap Posyandu.
4. Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian

masyarakat secara bertahap.

5. Terpenuhinya fasilitasi untuk kelancaran aktifitas perekonomian di nagari.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ini, masih ditemui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana belum memadai.
2. Masih kurangnya kualitas SDM Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan di Nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
3. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya:

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari OPD, sehingga tidak terjadi pengurangan anggaran terhadap Program/Kegiatan yang direncanakan/usulkan.
2. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan Nagari, hendaknya DPMD/N didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan DPMD/N, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik kerjasama antara DPMD/N, Kecamatan dan Nagari dalam memberikan solusi dari permasalahan yang ada/muncul di Masyarakat/Nagari, dalam bentuk forum komunikasi rapat-rapat koordinasi dan peninjauan/survey ke lapangan.
2. Sumber dana yang tersedia.
3. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.
4. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam Pembangunan Nagari.

5. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
6. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di nagari.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja DPMD/N dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada Akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Adapun hasil perbandingan antara rancangan RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja DPMD/N yang tertuang dalam Renja DPMD/N disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 (Tabel T.C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100%	5.334.573	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	100%	5.334.573	
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	489.173	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	489.173	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD/N	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34/12 Orang/bulan	4.891.730	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD/N	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34/12 Orang/bulan	4.891.730	
I.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	166	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	166.177	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.287	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.287	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.263	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.263	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD/N	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.089	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD/N	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.089	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD/N	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	1.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD/N	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	1.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD/N	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.950	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD/N	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.950	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan	110.788	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan	110.788	
I.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD/N	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	13.462	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD/N	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	13.462	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.462	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.462	
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD/N	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	65.005	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD/N	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	65.005	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.505	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.505	
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD/N	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	100%	198.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD/N	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	100%	198.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	165.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	165.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	6.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	6.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.400	
II	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD/N	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0%	-	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD/N	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0%	-	
I.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	DPMD/N	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Penataan Nagari	0%	-	Penyelenggaraan Penataan Desa	DPMD/N	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Penataan Nagari	0%	-	
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD/N	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80%	154.914	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD/N	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80%	154.914	
		DPMD/N	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100%	-		DPMD/N	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100%	-	
III.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD/N	Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	154.914	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD/N	Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	154.914	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	79 Dokumen	5.250	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	79 Dokumen	5.250	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	79 Dokumen	76.664	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	79 Dokumen	76.664	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD/N	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	79 Orang	73.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD/N	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	79 Orang	73.000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD/N	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	90%	1.246.792	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD/N	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	90%	1.246.792	
		DPMD/N	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	90%	-		DPMD/N	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	90%	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IV.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD/N	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi Pemberdayaannya	90%	1.246.792	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD/N	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi Pemberdayaannya	90%	1.246.792	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD/N	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	78.067	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD/N	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	78.067	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD/N	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	79 Laporan	100.002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD/N	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	79 Laporan	100.002	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	93 Dokumen	24.180	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	93 Dokumen	24.180	
					6.736.279					6.736.279	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Usulan Nagari dan Kecamatan diakomodir melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dan Renja DPMD/N Tahun 2026 juga mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat telah menjadi perhatian serius DPMD/N dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2026 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan dari pemangku kepentingan/masyarakat. Jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMD/N, usulan-usulan kegiatan dari pemangku kepentingan selaras dengan isu-isu yang dikemukakan yang salah satunya yaitu belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		N	I	H	
		I	H	I	
		L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategis Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2025-2029 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Asta Cita Pembangunan dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas. Perumusan kebijakan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal, memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah holistik, tematik, terintergrasi dan spasial. Kebijakan nasional terkait dengan pembangunan desa dibawah koordinasi Kementerian Desa, menetapkan program prioritas Kemendes PDPT 2026 berfokus pada tiga program utama: Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) yang didanai dari pinjaman luar negeri, fasilitasi kompetensi pencegahan stunting melalui program Holistik Integratif (HLN), dan pendampingan desa. Kemudian terdapat program inisiatif lainnya yaitu Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi. Koperasi Desa Merah Putih akan diluncurkan dan akan menjadi bagian dari program untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Program prioritas Presiden, seperti swasembada pangan, menjadi fokus utama yang memerlukan kolaborasi intensif antar kementerian dan lembaga untuk mendukung ketahanan pangan di desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD/N Tahun 2026

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2025-2029. Dalam Renstra DPMD/N Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pencapaian Misi ke-7 Kepala Daerah. Misi tujuh (7) adalah Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari. Misi ini bertujuan untuk memperkuat potensi dan kapasitas masyarakat di tingkat nagari (desa) agar dapat mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan wilayah. Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran nagari dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan yang

baik. Keberhasilan misi ini diukur melalui peningkatan Persentase Desa Mandiri, yang mencerminkan kemampuan nagari dalam mengelola potensi secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat

Selanjutnya mengacu pada Renstra DPMD/N Tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merumuskan **tujuan** yaitu: **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Nagari**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan **Sasaran** jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola, Kerjasama Dan Pembinaan Nagari Serta Kapasitas Lembaga Dan Masyarakat Dalam Pembangunan.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPMD/N.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja DPMD/N
Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
2	3	4	5	6
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Nagari	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Nagari	Persentase Desa Mandiri	88,61%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPMD/N	Nilai SAKIP	74,5

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat rumusan tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran beserta dengan target yang akan dicapai pada Tahun 2026. Indikator kinerja dari rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu: Persentase Desa Mandiri dengan target 88,61%. Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di Kabupaten. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPMD/N untuk Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2026 mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan Renstra DPMD/N Tahun 2025-2029. Sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program-program yang akan mendukung tercapainya target kinerja DPMD/N sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu juga memperhatikan program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya program nasional terkait pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada tahun 2026 DPMD/N akan melaksanakan program dan kegiatan rutin pada setiap SKPD dan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada program penunjang urusan pemerintah daerah adalah sub kegiatan yang akan mendorong target kinerja meningkatnya kualitas pelayanan dan terwujudnya reformasi birokrasi di DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada program urusan pemberdayaan masyarakat adalah sub kegiatan yang akan mendorong tercapainya sasaran **“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Nagari”** di Kab. Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan rumusan tujuan, sasaran dan target kinerja Renja DPMD/N tahun 2026, maka program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 terdiri dari 2 program yaitu: Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan DPMD/N Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 dan 3.3 berikut.

Tabel 3.2
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD
		3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
			Pemerintah Daerah		
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Measin Lainnya
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.3
Program Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

NO.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
				5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan tabel diatas dapat direkapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 seperti pada tabel 3.4 dengan total anggaran Rp. 6.736.278.860,-.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
DPMD/N Tahun 2026

PROGRAM	PAGU INDIKATIF	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.334.573.260,00	5	14
2 Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.401.705.600,00	2	8
Total	6.736.278.860,00	7	22

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada tahun 2026 yang mendukung program Prioritas Kabupaten sesuai dengan RKPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan DPMD/N
Pendukung Prioritas Kabupaten

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	Perwujudan Kemandirian Nagari Berbasis Potensi Wilayah	Terwujudnya Pemenuhan Layanan Dasar dan Aksesibilitas Nagari di Nagari yang Berstatus Maju Menuju Nagari Berstatus Mandiri	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan: 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	

Untuk pendukung Program Prioritas Daerah Perwujudan Kemandirian Nagari Berbasis Potensi Wilayah, terdapat 1 Program yaitu Program Administrasi Pemerintahan Desa. Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Total pagu anggaran sebanyak Rp. 154.914.000,-. Secara rinci, rumusan Program dan Kegiatan DPMD/N Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dituangkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 (Tabel T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI				6.736.278.860,00				11.321.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.736.278.860,00				11.321.000.000,00
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.736.278.860,00				11.321.000.000,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah	DPMDN	100%	5.334.573.260,00	DAU		100%	5.751.000.000,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	DPMDN	100%	4.891.729.760,00	DAU		100%	4.500.000.000,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	DPMDN	100%	166.177.000,00	DAU		100%	496.000.000,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	DPMDN	100%	13.462.000,00	DAU		100%	445.000.000,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	DPMDN	100%	65.004.500,00	DAU		100%	124.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	DPMDN	100%	198.200.000,00	DAU		100%	160.000.000,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	KAB. LIMA PULUH KOTA	0%	0,00	DAU		4%	320.000.000,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Penataan Nagari	KAB. LIMA PULUH KOTA	0%	0,00	DAU		4%	320.000.000,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KAB. LIMA PULUH KOTA	80%	154.914.000	DAU		80%	3.100.000.000,00
		Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa		100%				100%	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	KAB. LIMA PULUH KOTA	100%	154.914.000,00	DAU	Kemiskinan	100%	3.100.000.000,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	KAB. LIMA PULUH KOTA	90%	1.246.791.600	DAU		90%	2.150.000.000,00
		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		90%				90%	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi Pemberdayaannya	KAB. LIMA PULUH KOTA	90%	1.246.791.600,00	DAU	TTG, PKK, Kemiskinan, Pemuda Kepeloporan	90%	2.150.000.000,00
J U M L A H					6.736.278.860,00				11.321.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan DPMDN Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026 serta perkiraan maju untuk Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Renja Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1																
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI						6.736.278.860,00							11.321.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.736.278.860,00							11.321.000.000,00	
	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						6.736.278.860,00							11.321.000.000,00	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-				5.334.573.260,00						-	5.751.000.000,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-		5.334.573.260,00	-	-	-	-	-	-	5.751.000.000,00	-
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				4.891.729.760,00						-	4.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34/12 Orang/bulan	4.891.729.760,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		4.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				35 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	166.177.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	496.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.287.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	26.263.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.089.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				215 Laporan	110.788.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.462.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	445.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	13.462.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATOB ERINTEGRITAS"	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.004.500,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	124.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	49.504.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	198.200.000,00				-	-	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	165.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	26.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	0,00					-	320.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1																	
		[Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Penataan Nagari]	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	320.000.000,00	-	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	0,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa															
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				4 Desa	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	154.914.000,00							3.100.000.000,00		
		[Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan]	-	-	-	-	-	154.914.000,00	-	-	-	-	-	-	3.100.000.000,00	-	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	154.914.000,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan	-	-	3.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Berkelanjutan				
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				79 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				79 Dokumen	76.664.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
		-	-	-	-	-	-	154.914.000,00	-	-	-	-	-	-	3.100.000.000,00	-
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				79 Orang	73.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
		[Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan]	-	-	-	-	-	154.914.000,00	-	-	-	-	-	3.100.000.000,00	-	
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				79 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				79 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				158 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				79 Desa	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	1.246.791.600,00						-	2.150.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.246.791.600,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pengentasan Kemiskinan	-	-	2.150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				79 Dokumen	71.073.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pengentasan Kemiskinan	-		800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				79 Lembaga	973.469.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pengentasan Kemiskinan	-		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				79 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1							79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5 Laporan	78.067.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				79 Laporan	100.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pengentasan Kemiskinan	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				93 Dokumen	24.180.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
J U M L A H								6.736.278.860,00						11.321.000.000,00		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) DPMD/N Tahun 2026 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat Kabupaten sampai pada Musrenbang Tingkat Provinsi dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kerja DPMDN ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Nomor --- Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Sementara itu Renja 2026 yang disusun juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPMD/N 2025-2029.

Penyusunan Rencana Kerja fokus kepada pencapaian target kinerja. Program dan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja, merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran. Selain itu keberhasilan pelaksanaan Renja DPMD/N ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf DPMD/N. Tata kelola sumberdaya manusia, anggaran maupun tata kelola peralatan/perlengkapan yang efisien dan efektif sangat diperlukan. Selain itu dibutuhkan juga sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur DPMD/N, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan (Tahun 2026), seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan sudah dapat diselesaikan. Demikian Rencana Kerja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2026 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja DPMD/N dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI